

## **Pengaruh Faktor Politik Terhadap *Discretionary Accruals* Pada Pemerintah Daerah di Indonesia**

Hilda Ratna Dewi<sup>1</sup>, Rindu Rika Gamayuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia serta pengaruh faktor politik terhadap praktik tersebut. Analisis dilakukan menggunakan model random effects (REM) dengan perangkat lunak Eviews 10, dan *discretionary accruals* diestimasi sebagai proksi manajemen laba melalui *Modified Jones Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah petahana memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *discretionary accruals*, sedangkan tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh. Dengan demikian, *discretionary accruals* cenderung lebih tinggi pada daerah yang dipimpin oleh kepala daerah petahana, sementara tahun Pilkada tidak memengaruhi perubahan *discretionary accruals*.

**Kata Kunci:** *discretionary accruals, pemerintah daerah, faktor politik, manajemen laba, tahun pilkada.*

### **Abstract**

*This research aims to obtain empirical evidence regarding practice discretionary accruals on local governments in Indonesia as well as the influence of political factors on this practice. Analysis was carried out using the random effects model (REM) with Eviews 10 software, and discretionary accruals estimated as a proxy for earnings management through Modified Jones Model. The research results show that incumbent regional heads have a significant positive influence on discretionary accruals, while the year of the regional elections has no influence. Thus, discretionary accruals tends to be higher in regions led by incumbent regional heads, while the year of the regional elections does not influence the change discretionary accruals.*

**Keywords:** *discretionary accruals, local government, political factors, earnings management, regional election year*

---

Copyright (c) 2024 Hilda Ratna Dewi

✉ Corresponding author :

Email Address : [ratnadewi.hilda@gmail.com](mailto:ratnadewi.hilda@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Penelitian tentang *earnings management* telah banyak dilakukan di sektor swasta, namun masih terbatas di sektor publik (Ferreira *et al.*, 2020). Salah satu faktor penentu *earnings management* adalah faktor politik, termasuk pemilihan kepala daerah dan ukuran pemerintah daerah (Cohen *et al.*, 2019). Dalam konteks pemerintah daerah, akuntansi berbasis akrual sering dikelola untuk menyesuaikan

surplus atau defisit anggaran, yang di Indonesia dikenal sebagai SiLPA/SiKPA (Pellicer *et al.*, 2016). Manipulasi laporan keuangan melalui *discretionary accruals* biasanya dilakukan demi kepentingan pribadi, seperti pencitraan politik (Bisogno & Donatella, 2021).

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, akuntansi pemerintah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Penerapan basis akrual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan publik (Vinnari & Näsi, 2008; Hyndman & Connolly, 2011). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga menjadi pedoman penting untuk menjamin penerapan prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Putri *et al.*, 2021). Namun, penerapan akuntansi berbasis akrual ini juga membuka peluang untuk praktik *earnings management* (Afiqoh, 2020; Lapsley *et al.*, 2009).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memainkan peran penting dalam menyediakan informasi bagi berbagai pihak, seperti DPRD dan masyarakat, untuk menilai kinerja keuangan pemerintah (Rivenbark & Roenigk, 2011; Abdullah, 2012). Dalam hal ini, kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan PP RI No. 58 Tahun 2005. Wewenang tersebut membuka peluang bagi praktik *creative accounting* atau *earnings management*, khususnya melalui *discretionary accruals*, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan DPRD sebagai pengawas APBD (Beck, 2018; Cohen *et al.*, 2019). Sayangnya, DPRD sering kali kekurangan pengetahuan untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan ini (Abdullah *et al.*, 2021).

Kebebasan dalam pelaporan akuntansi memberikan peluang bagi manajemen oportunistik untuk menyamarkan ketidakpatuhan, menciptakan asimetri informasi antara pemerintah daerah dan pengguna LKPD (Pilcher, 2011). Kondisi ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai manipulasi akuntansi dan *earnings management* di sektor publik (Cohen, 2012), terutama yang berkaitan dengan faktor politik, seperti pemilihan kepala daerah (Cohen *et al.*, 2019). Di Indonesia, penelitian tentang *earnings management* di sektor publik masih terbatas, meskipun faktor politik sangat relevan dalam mempengaruhi praktik ini (Gamayuni, 2022; Rohman *et al.*, 2018).

Penelitian ini memodifikasi studi Cohen *et al.* (2019) dan Ferreira *et al.* (2020) untuk meneliti pengaruh faktor politik, seperti pemilihan kepala daerah petahana dan ukuran legislatif, terhadap *earnings management* di Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini, maka judul penelitian dapat dirumuskan menjadi "**Pengaruh Faktor Politik Terhadap Discretionary Accruals Pada Pemerintah Daerah di Indonesia**".

## METODOLOGI

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengembangkan model matematis dengan data berupa angka dari laporan keuangan yang merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat angka *discretionary accruals*. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yaitu LKPD untuk provinsi se-Indonesia. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi seperti mencatat dan mengumpulkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didapat melalui portal resmi <https://e-ppid.bpk.go.id/>.

## Populasi dan Sampel Penelitian

Pemerintah provinsi yang melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 merupakan populasi pada penelitian ini. Terdapat 33 provinsi yang melakukan pilkada dengan waktu yang berbeda-beda. Metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel 33 entitas Provinsi yang berkriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan total 198 objek pengamatan.

## Definisi Variabel

### 1. Variabel Terikat (Y)

*Discretionary Accruals* (DA) merupakan *dependent variable* (variabel terikat) pada penelitian ini. Praktik *discretionary accruals* sendiri adalah upaya pengelolaan angka akuntansi yang dilakukan agar angka surplus/defisit mendekati nol dimana surplus/defisit (yang telah dikelola) dikurangi pendapatan sebelum dikelola (Pellicer *et al.*, 2016). Pengelolaan akuntansi ini ditandai dengan adanya akrual yang tidak normal (Gamayuni, 2022). Di Indonesia, ini disebut SiLPA/SiKPA dimana jika surplus, maka angka akuntansi positif sedangkan jika defisit maka akuntansi negatif. Hal ini kemudian dikelola agar angka surplus/defisit mendekati nol (Ferreira *et al.*, 2020).

### 2. Variabel Bebas (X)

Faktor Politik digunakan sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang dilihat dari kepala daerah petahana (*incumbent*), tahun pilkada dan ukuran legislatif. Kepala daerah petahana (*incumbent*) yang dimaksud pada penelitian ini adalah kepala daerah provinsi atau yang disebut gubernur. Variabel kepala daerah petahana (*incumbent*) diproksikan dengan menggunakan variabel *dummy* yang akan diberi skor 1 pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) yang dipilih kembali (sudah menjabat dua periode) dan mencalonkan diri (untuk kedua kalinya) jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun bersangkutan dan akan diberi skor 0 pemerintah daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih (menjabat) dan tidak ada petahana yang mencalonkan diri jika pilkada.

Tahun pilkada yang dimaksud pada penelitian ini adalah tahun pemilihan kepala daerah yaitu pemerintah provinsi yang melakukan pilkada pada tahun yang bersangkutan. Pemerintah provinsi di Indonesia melaksanakan pilkada serentak namun bervariasi. Artinya, dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia saat ini, sejauh ini belum pernah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersama-sama dalam tahun yang sama dan baru akan dilakukan pada tahun 2024. Untuk tahun pilkada akan diberikan skor 1 jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun itu dan skor 0 untuk provinsi yang tidak melakukan pilkada pada tahun yang sama.

## Metode Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Metode deskriptif yang menyajikan detail tentang data dalam penelitian. Analisis statistik berguna dalam menganalisis penilaian umum atas masing-masing variabel penelitian. Penggunaan analisis ini terbatas pada penyajian dan

evaluasi data disertai perhitungan. Perhitungan dilakukan sebagai bentuk memperjelas keadaan ataupun karakteristik pada data bersangkutan mencakup data minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) serta nilai deviasi standar (Ghozali, 2016) sebagaimana gambaran umum.

## 2. Metode Pemilihan Model

Dalam menentukan jenis model, digunakan uji Chow dan uji Hausman yang menjadi dasar penggunaan analisis panel. Digunakan Uji Chow dengan tujuan menentukan penggunaan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect*. Kemudian dalam penentuan model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* digunakan Uji Hausman.

## 3. Uji Spearman dan Pearson

Uji pearson adalah metode yang digunakan untuk menguji tingkat korelasi dengan menghitung koefisien korelasi Pearson (*r*) linier antara dua variabel. Sedangkan uji spearman adalah metode yang digunakan untuk menguji korelasi peringkat (*rank*) dengan menghitung koefisien korelasi Spearman (*rs*). Namun begitu, uji Pearson dan Spearman tetaplah berbeda. Selain jenis korelasi yang diuji, perbedaan lainnya adalah uji Pearson memerlukan asumsi distribusi normal. Jadi, jika variabel yang diuji tidak memenuhi asumsi distribusi normal maka uji Spearman digunakan.

## 4. Analisis Regresi Data Panel

Digunakan metode analisis data panel (*pooled data*) pada penelitian ini untuk menguji dampak *independent variable* pada *dependent variable*. Data panel (*pooled data*) merupakan analisis yang mengkombinasikan deret waktu atau *time series* dengan kerat lintang atau *cross section*. Gujarati dan Porter (2012) menjelaskan model *cross section* dapat ditulis dengan seperti ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N merupakan jumlah data *cross-section*, sedangkan model *time series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + e_t; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah jumlah data *time-series*. Dikarenakan data panel adalah gabungan dari kedua model (*cross section* dan *time series*), maka modelnya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \mu_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N = jumlah banyak observasi

T = jumlah banyak waktu

N × T = jumlah banyak data panel

Maka model untuk penelitian ini adalah:

$$DA_{it} = \beta_0 + \beta_1 election_{it} + \beta_2 election\_year_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

$DA_{it}$  : *Discretionary Accruals* pada tahun t untuk daerah i

- election** : *dummy variable* dimana skor 1 untuk kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali dan atau yang sudah menjabat dua periode dan skor 0 untuk kepala daerah periode pertama dan tidak ada calon petahana pada daerah yang melakukan pilkada pada tahun t untuk daerah i
- election\_year** : *dummy variable* dimana skor 1 untuk daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah dan skor 0 daerah yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun t untuk daerah i
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$  : Koefisien Regresi
- $\mu_{it}$  : *Error term* pada tahun t untuk daerah i

Tiga macam analisis regresi data panel :

a. *Common Effect Model* (CEM)

Model sederhana yang mengintegrasikan semua data *time series* dengan data *cross section*, setelah itu dilakukan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*). *Common Effect Model* mengasumsikan intersep dan kemiringan (slope) dari setiap variabel sama. Berlaku untuk semua entitas variasi. Atau hasil regresi dalam pengertian lain diasumsikan berlaku pada semua provinsi di semua waktu. Kelemahan dari model ini adalah karena perbedaan model dengan realitas (situasi sebenarnya).

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini menyimpulkan bahwa perbedaan dasar antara individu dapat diatasi melalui variasi dari intersep, tetapi intersep antarwaktu adalah konstan (*time invariant*). Koefisien regresi tetap antarindividu dan antarwaktu merupakan maksud daripada *fixed effect*. Intersep (nilai awal) untuk tiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan dikalkulasi serta dengan memasukan *dummy variable* pada umumnya.

c. *Random Effect Model* (REM)

Sebagai upaya menanggulangi kelemahan model *Fixed Effect* maka REM digunakan. Dimana *dummy variable* digunakan. Model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu yang karenanya, model ini mengasumsikan setiap individu memiliki perbedaan intersep yang adalah *random variable*. Penggunaannya akan menyebabkan model diragukan serta mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*). Hal ini akan mengurangi efektivitas atau kinerja dari parameter yang dikalkulasi.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Statistik T (Uji signifikansi parameter individual)

Uji t dilakukan untuk mengestimasi koefisien regresi masing-masing variabel independen. Dengan demikian, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui. Pengujian dari Uji T disimpulkan dengan apabila probabilitas t hitung  $> \alpha$ , ini mengindikasikan bahwa variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya.

### 2. Uji Statistik F (Uji signifikansi)

Selanjutnya, uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Apabila probability F hitung  $< \alpha$  berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Setelah itu, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dipakai untuk menghitung sejauh mana keragaman semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Dimana nilai koefisien determinasi ini berada antara 0 dan ( $0 < R < 1$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean
<i>Discretionary Accruals</i> (Y)	0.000	0.586	0.04647
<i>Incumbent</i> (X1)	0	1	0,49
Tahun Pilkada (X2)	0	1	0,21

Sumber : Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 25, 2023.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, didapatkan hasil analisis statistik deskriptif dengan gambaran umum dari data adalah sebagai berikut:

#### a. *Discretionary Accruals*

Dari tabel 1 diatas menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian pertama yaitu *Discretionary Accruals* (DA) memiliki nilai rata-rata positif sebesar 0,04647 yang menandakan terdapat surplus/defisit lebih tinggi dari yang sebenarnya. Artinya, pemerintah daerah provinsi yang dijadikan sampel cenderung menggunakan prosedur untuk menaikkan surplus/defisit agar mendekati nol. Prosedur atau kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini misalnya menaikkan akun-akun akrual seperti pendapatan, piutang dan biaya penyusutan (Gamayuni, 2022).

#### b. Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*)

Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk kepala daerah petahana (*Incumbent*) sebagai variabel kedua dalam penelitian memiliki nilai rata-rata positif sebesar 0,49. Hal ini menandakan, dari 33 sampel pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang digunakan selama 6 tahun berturut-turut total kepala daerah petahana masih lebih sedikit atau hampir sama jumlahnya dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih.

#### c. Tahun Pilkada

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif tahun pilkada sebagai variabel penelitian ketiga memiliki nilai positif rata-rata sebesar 0,21 berarti, dari 33 sampel pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang digunakan selama 6 tahun berturut-turut total pemilihan kepala daerah (pilkada) masih lebih sedikit. Hal ini tentunya dikarenakan pilkada yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia dengan jadwal pilkada yang berbeda-beda.

## 2. Metode Pemilihan Model

### a. Uji Chow

**Tabel 2** Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
--------------	------------	------	-------

<b>Cross-section F</b>	3.552035	(32,163)	0.0000
<b>Cross-section Chi-square</b>	204.753401	32	0.0000

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Dari tabel 2 di atas menunjukkan hasil dengan nilai prob. *cross-section F* pada uji Chow adalah 0,0000 atau kurang dari (<) alpha 0,05 yang artinya pengujian ini menjelaskan bahwa H1 diterima dimana tentunya menjelaskan bahwa kepercayaan model terbaik 95% menggunakan *Fixed Effects Model*.

### b. Uji Hausman

**Tabel 3** Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistics	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<b>Cross-section random</b>	0.521290	2	0.7706

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Dari tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji dengan nilai prob. *cross-section random* adalah 0,7706 atau lebih besar dari (>) alpha 0,05 yang artinya pengujian ini menjelaskan bahwa H0 diterima dimana hal ini memberikan pernyataan jika kepercayaan model terbaik menggunakan *Random Effects Model*.

### c. Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch Pagan

**Tabel 4.** Hasil Uji LM Breusch Pagan

Alternative	Cross-section	Time	Both
<b>Breusch-Pagan</b>	42.14152 (0.0000)	0.535394 (0.4643)	42.67691 (0.0000)

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Dari tabel 4 menunjukkan hasil uji dengan nilai P value yang ditunjukkan oleh angka dalam tanda kurung sebesar 0,0000 dimana kurang dari (<) 0,05, sehingga H1 diterima yang artinya *random effect model* adalah model estimasi paling baik yang dapat digunakan.

## 3. Uji Korelasi Pearson dan Spearman

**Tabel 5** Hasil Uji *Pearson* dan *Spearman*

Pearson Spearman		Discretionary Accruals	Incumbent	Tahun Pilkada
<b>Discretionary Accruals</b>	<b>Correlation Coefficient</b>	1	0,093	-0,096
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.	0,195	0,179
	<b>N</b>	198	198	198
<b>Incumbent</b>	<b>Correlation Coefficient</b>	0,039	1	0,060
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	0,589	.	0,402
	<b>N</b>	198	198	198
<b>Tahun Pilkada</b>	<b>Correlation Coefficient</b>	-0,109	0,060	1
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	0,126	0,402	.
	<b>N</b>	198	198	198

Sumber : Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 25, 2023.

Dari tabel 5 diatas menunjukkan hasil uji korelasi pearson dan spearman untuk kepala daerah petahana (*incumbent*) dengan *discretionary accruals* (DA) berkorelasi positif dengan hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Sedangkan untuk tahun pilkada dengan *discretionary accruals* (DA) berkorelasi negatif dengan hubungan yang lemah dan tidak signifikan.

#### 4. Analisis Regresi Data Panel

Setelah melalui ketiga uji sebelumnya (Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan), maka ditetapkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Random Effects Model* (REM).

**Tabel 6.** Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041780	0.009068	4.607505	0.0000
X1 ( <i>Incumbent</i> )	0.016515	0.008756	1.886208	0.0608
X2 (Tahun Pilkada)	-0.016049	0.009977	-1.608575	0.1093
<b>Estimasi</b>				
R-Squared		0.029176		
Adj. R-Squared		0.019219		

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Berdasarkan output yang dihasilkan dan ditampilkan pada Tabel 6, didapatkan model terbaik yang dapat memodelkan hubungan variabel dependen *Discretionary Accruals* (DA) dengan variabel independen Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) dan Tahun Pilkada adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = 0.041780 + 0.016515X_{1it} - 0.016049X_{2it}$$

Interpretasi:

- Besarnya nilai *Discretionary Accruals* (DA) jika tidak dipengaruhi oleh variabel independen adalah 0,041780 satuan.
- Setiap variabel independen Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) atau Kepala Daerah yang dipilih kembali di Indonesia bertambah satu satuan maka variabel *Discretionary Accruals* (DA) cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,016515.
- Setiap satuan variabel independen Tahun Pilkada dalam arti pada tahun pemilihan kepala daerah bertambah satu satuan maka variabel *Discretionary Accruals* (DA) cenderung mengalami penurunan sebesar 0,016049.

#### Uji Hipotesis

##### 1. Statistik Uji F

**Tabel 7.** Hasil Uji F

F-statistic	2.930179
Prob(F-statistic)	0.055743

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Uji Statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (*independent variable*) pada variabel terikat (*dependent variable*) secara bersamaan. Pengujian dilakukan pada tingkat alpha ( $\alpha$ ) sebesar 10% (0,10). Error 10% digunakan

berdasarkan pernyataan Sugiyono (2003) bahwa tingkat kesalahan maksimal pada penelitian ilmu sosial yang dapat ditolerir adalah 10%. Untuk menghindari kekeliruan dalam hal pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% sejalan dengan Goodhue, Lewis & Thompson (2007) yang mengatakan apabila *statistical power* rendah, maka secara statistik peneliti tidak akan menemukan hasil yang signifikan. Walaupun padahal seharusnya ada hubungan. Dengan hasil regresi data panel yang menunjukkan nilai prob. F-statistik sebesar  $0.055743 <$  (lebih kecil dari) nilai signifikansi alpha ( $\alpha=10\%$ ) sehingga dinyatakan bahwa variabel bebas yaitu kepala daerah petahana (*incumbent*) dan tahun pilkada berpengaruh terhadap *Discretionary Accruals* (DA) pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia secara bersama-sama.

## 2. Statistik Uji T

**Tabel 8.** Hasil Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041780	0.009068	4.607505	0.0000
X1 ( <i>Incumbent</i> )	0.016515	0.008756	1.886208	0.0608
X2 (Tahun Pilkada)	-0.016049	0.009977	-1.608575	0.1093

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

### a. Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai probabilitas signifikansi kepala daerah petahana (*incumbent*) sebesar  $0,0608 < \alpha$  (0,10). Karenanya, hipotesis pertama diterima. Maka disimpulkan, kepala daerah petahana (*incumbent*) berpengaruh positif signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA).

### b. Tahun Pilkada

Dengan berdasar pada hasil analisis, didapatkan nilai prob. sig. tahun pilkada sebesar  $0,1093 > \alpha$  (0,10). Karenanya, hipotesis kedua ditolak. Maka disimpulkan, tahun pilkada tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA).

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 9.** Hasil Estimasi Determinasi ( $R^2$ )

	Estimasi
R-Squared	0.029176
Adj. R-Squared	0.019219

Sumber : Data diolah dengan EViews 10, 2023.

Dengan dasar nilai *r-square*, variasi angka *Discretionary Accruals* (DA) yang mampu dijelaskan oleh variabel X1 (Kepala Daerah Petahana/*Incumbent*) dan X2 (Tahun Pilkada) sebesar 2,9%. Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa di Indonesia *Discretionary Accruals* (DA) yang merupakan proksi manajemen laba pada pemerintah daerah provinsi Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya dengan Faktor Politik yang diproksikan dengan Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) dan Tahun Pilkada. Sebesar 97,1% *Discretionary Accruals* (DA) dijelaskan oleh faktor lainnya.

## 1. Pengaruh Kepala Daerah Petahana (Incumbent) terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, kepala daerah petahana (*incumbent*) berkorelasi positif dengan hubungan yang lemah dan tidak signifikan atas dasar hasil uji *pearson* dan *spearman*. Uji regresi data panel menunjukkan koefisien positif dengan angka 0,016515 dan probabilitas 0,0608. Maka *discretionary accruals* (DA) akan naik sebanyak 1,6% apabila variabel kepala daerah petahana (*incumbent*) bertambah satu satuan. Atau dengan kata lain, *discretionary accruals* (DA) lebih tinggi 1,6% pada daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) daripada pada daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih.

Hal ini mengkonfirmasi teori pilihan publik (*public choice theory*) yaitu terdapat konflik kepentingan antara kepala daerah (politisi) dengan pemangku kepentingan seperti warga negara (pemilih) didasarkan pada aksioma kepentingan pribadi dimana politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri dan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik karena adanya persaingan politik. Teori agensi (*agency theory*) juga ditemukan bahwa ada korelasi (hubungan) kerja antara *principal* dan *agent* yang dapat digambarkan seperti hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Politisi bersedia menggunakan informasi akuntansi demi kepentingan mereka (Guarini, 2016) untuk mendapatkan dukungan pemilih. Sedangkan pemilih mengidentifikasi hasil kerja politisi khususnya kepala daerah salah satunya dari informasi akuntansi dalam hal kesejahteraan publik/sosial.

Kepala daerah petahana (*incumbent*) merupakan kepala daerah yang sedang menjabat, artinya lebih mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Terutama petahana yang terpilih kembali atau sudah menjabat pada periode kedua dianggap memiliki posisi yang lebih baik untuk memanipulasi pendapatan untuk memenuhi tujuan mereka (Cohen et al., 2019). Kepala daerah petahana (*incumbent*) memiliki konsekuensi jika SiLPA/SiKPA terlalu tinggi maka akan mengarah pada kinerja mereka yang buruk. Hal ini relevan selama periode tekanan politik. Untuk menghindari hal ini, kepala daerah perlu mencari cara untuk melaporkan SiLPA/SiKPA mendekati nol (Ferreira et al., 2013).

Penelitian ini menemukan hasil yang konsisten (sejalan) dengan apa yang telah disebutkan oleh Cohen et al. (2019) bahwa kepala daerah petahana (*incumbent*) memiliki pengaruh positif terhadap praktik manajemen laba (*earnings management*) yang diukur dengan *discretionary accruals*. Hal ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh García-Sánchez et al. (2014), yang menemukan hubungan antara pemilihan ulang dengan *discretionary power* (distorsi) dalam keuangan pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh Tahun Pilkada terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, tahun pilkada berkorelasi negatif dengan hubungan yang lemah dan tidak signifikan atas dasar hasil uji *pearson* dan *spearman*. Uji regresi data panel menunjukkan koefisien negatif dengan angka 0,016049 dan probabilitas 0,1093. Maka *discretionary accruals* (DA) tidak dipengaruhi oleh tahun pilkada karena nilai probabilitas lebih besar daripada 10%. Artinya, *discretionary accruals* (DA) akan sama meskipun pada tahun pilkada dan bukan tahun pilkada. Kenaikan/penurunan *discretionary accruals* (DA) tidak dipengaruhi oleh tahun-tahun pilkada.

Seharusnya, sesuai dengan pernyataan (García-Sánchez et al., 2014) pemilu dapat menjadi motif politisi untuk berperilaku oportunistik (García-Sánchez et al., 2014). Kepala daerah petahana (*incumbent*) tentu saja berusaha menunjukkan hasil keuangan yang sesuai dengan harapan publik. Hal ini ditujukan tidak serta-merta untuk kepentingan publik melainkan agar kepala daerah tersebut dipilih kembali. Di tahun-tahun politik, lawan politik juga berusaha menjatuhkan petahana dengan menggunakan informasi akuntansi (Guarini, 2016).

Pada tahun politik ini, persaingan politik menjadi lebih ketat dan informasi akuntansi berperan dalam menyediakan amunisi untuk menyalahkan lawan politik dan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tahun pilkada berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan *discretionary accruals* (DA). Hal ini akan membuat pemerintah daerah terutama kepala daerah petahana (*incumbent*) melakukan *discretionary accruals* untuk mencapai tujuan tertentu.

Hasil penelitian tidak searah (sejalan) dengan penelitian (Cohen et al., 2019) yang menyebutkan tahun pemilihan dan pra-pemilihan berpengaruh terhadap *discretionary accruals* yang merupakan proksi dari *earnings management*. Juga tidak sejalan dengan (Ferreira et al., 2020) yang menyatakan bahwa pada tahun pra-pemilu *earnings management* sangat tinggi karena konfrontasi politik yang kuat yang mana ini juga terjadi pada tahun pemilihan kepala daerah.

Hal ini tidak terdukung di Indonesia, perbedaan kultur dan budaya pada setiap negara yang diuji merupakan hal terkuat dibalik tidak terdukungnya hipotesis ini. Penelitian ini menguji pemda provinsi di wilayah Indonesia yang mana pemilihan kepala daerah sejauh ini dilaksanakan selama lima tahun sekali dan tidak secara bersama-sama melainkan berdasarkan jadwal yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada penelitian (Cohen et al., 2019) yang menemukan bahwa tahun pemilihan dan pra-pemilihan berpengaruh terhadap *discretionary accruals* hanya pada negara Yunani dan diindikasikan terjadi karena pemilihan dilaksanakan serentak di seluruh negeri dan menciptakan suasana politik yang intens. Setiap negara memiliki keunikan pada budaya pemilihan ulang kepala daerahnya. Hasil pengujian bisa jadi berbeda apabila diterapkan pada sampel kabupaten/kota di seluruh Indonesia ataupun jika diterapkan pada negara lain.

## SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga untuk memperoleh bukti empiris bahwa faktor politik mempengaruhi pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan praktik *discretionary accruals*. Analisis data panel REM digunakan pada penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan *software Eviews 10*. Dengan hasil uji hipotesis variabel Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) dan Tahun Pilkada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals* pada pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, *discretionary accruals* pada pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih. Semakin banyak kepala daerah petahana provinsi di Indonesia maka *discretionary accruals* semakin meningkat.

2. Tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* pada pemda provinsi di Indonesia sehingga  $H_0$  tidak ditolak. Kenaikan/penurunan *discretionary accruals* yang ada pada pemda provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tahun pilkada.
3. Kenaikan dan penurunan DA ini terbukti pada angka DA yang diketahui setelah uji yang dilakukan. Sebagai contoh, pada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, terdapat angka DA yang cukup rendah pada tahun Pilkada dibandingkan tahun lainnya dan DA mengalami peningkatan saat *incumbent* terpilih dan menjabat kembali. Hal ini membuktikan bahwa DA tidak dipengaruhi tahun pilkada namun *incumbent* yang menjabat dua periode terbukti meningkatkan angka DA.

### Referensi :

- Abdullah, S. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Afiqoh, N.W. (2020). APPLICATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND OBTAINING FAIR OPINIONS WITHOUT EXCEPTIONS. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Abdullah, S., Mirza, K., Junita, A., & Meutia, T. (2021). *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* URL : <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index> *Parliament Oversight on Local Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Government Financial Management an Empirical Evidence Empir*.
- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2020). Do top managers' individual characteristics affect accounting manipulation in the public sector? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 465-484. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz038>
- Arcas, M. J., & Martí, C. (2016). Financial Performance Adjustment in English Local Governments. *Australian Accounting Review*, 26(2), 141-152. <https://doi.org/10.1111/auar.12094>
- Beck, A. W. (2018). Opportunistic financial reporting around municipal bond issues. *Review of Accounting Studies*, 23(3), 785-826. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9454-2>
- Bisogno, M., & Donatella, P. (2021). Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 1-25. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035>
- Cohen, S. (2012). Cash versus accrual accounting measures in Greek municipalities: Proxies or not for decision-making? *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 8(3), 203-222. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2012.047807>
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 331-348. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2018-0162>
- Dharma, F. (2023). Regional Heads' Discretionary Spending in Local Election. *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS*. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.105>
- Dharma, F., Akhmad Syakhroza & Dwi Martani. (2022). Does the Local Assistance Budget Realization Affect Incumbents' Votes? (Study in Indonesia Local

- Election). *International Journal of Professional Business Review*. Miami, v.7.n.6.p.01-16.
- Donatella, P. (2020). Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities. *Public Money and Management*, 40(2), 122–130. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667684>
- Donatella, P., & Tagesson, T. (2021). CFO characteristics and opportunistic accounting choice in public sector organizations. *Journal of Management and Governance*, 25(2), 509–534. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09521-1>
- Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2013). Earnings Management Around Zero: A motivation to local politician signalling competence. *Public Management Review*, 15(5), 657–686. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707679>
- Gamayuni, R. R. (2022). MOTIVATION AND ABNORMAL ACCRUAL CHARACTERISTICS ON FINANCIAL STATEMENTS OF LOCAL GOVERNMENTS. 19(2), 969–991.
- García-Sánchez, I. M., Mordán, N., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2014). Do electoral cycles affect local financial health? *Policy Studies*, 35(6), 533–556. <https://doi.org/10.1080/01442872.2014.971727>
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (Cetakan ke VIII ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue, Dale., William Lewis & Ronald Thompson. 2007. *Statistical Power in Analyzing Interaction Effects: Questioning the Advantages of PLS with Product Indicators*. 18(2), pp. 211-227. Information Systems Research.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani., Darwanis., Abdullah, S. (2022). “DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan.*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ix.228.217a>
- Hyndman, N., & Connolly, C. (2011). Accruals accounting in the public sector: A road not always taken. *Management Accounting Research*, 22(1), 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.008>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60*. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Jakarta.
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta.

- Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta.
- Jones, M. (2011), *Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals*, John Wiley & Sons, London.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (The Influence of Size, Prosperity, Legislative Size, Leverage on Regional Government Financial Performance in Indonesia). *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35.
- Lapsley, I., Mussari, R., & Paulsson, G. (2009). On the adoption of accrual accounting in the public sector: A self-evident and problematic reform. *European Accounting Review*, 18(4), 719–723. <https://doi.org/10.1080/09638180903334960>
- Pellicer, M. J. A., Hodges, R., & Marti, C. (2016). Earnings Management in English Local Governments: Determining factors and instruments. *Financial Accountability & Management*, 17(4), 1–21.
- Pilcher, R. (2011). Local governmental management of discretionary and specific accruals. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1–2), 32–60. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2011.037725>
- Pina, V., Arcas, M. J., & Martí, C. (2012). Accruals and “accounting numbers management” in UK executive agencies. *Public Money and Management*, 32(4), 273–280. <https://doi.org/10.1080/09540962.2012.691306>
- Putri, M. V., Gamayuni, R. R., Komaruddin, K., & Dharma, F. (2021). Analisis Pendapatan Berbasis Kas Dan Berbasis Akrua Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 75–86. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i2.263>
- Rivenbark, W., & Roenigk, D. (2011). Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. *Public Administration Quarterly*, 35(2), 241.
- Rohman, A. (2016). Analisis Kebijakan Diskresi Akrua terhadap Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 10(1), 1–24. <https://core.ac.uk/download/pdf/267824030.pdf>
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PENDAHULUAN *Pengelolaan keuangan pemerintah telah banyak mengalami perubahan dari berbagai perspektif dan ruang lingkupnya . Siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan , penganggaran , pela*. 12(April), 29–50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>.
- Sugiyono. 2003. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Vinnari, E. M., & Näsi, S. (2008). Creative Accrual Accounting in the Public Sector: ‘Milking’ Water Utilities To Balance Municipal Budgets and Accounts. *Financial Accountability and Management*, 24(2), 97–116. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00448.x>